



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/154/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Hardimen, S.Pd.I., sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang dari unsur Alim Ulama diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 141.2/02/CBY-PS/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Hardimen, S.Pd.I., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Epis sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama periode Tahun 2017 sampai dengan 2023.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

The stamp is a circular official seal of the Bupati Pesisir Selatan. It features a central emblem with a bird (likely a Garuda) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. A signature is written over the stamp.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 154 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENETAPAN PENGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	HARDIMEN, S.Pd.I.	Ketua	Alim Ulama	EPIS	Ketua	Alim Ulama	
2	ADNAN, Pnk. Rj. GAMUYANG	Wakil Ketua	Cadiak Pandai	ADNAN Pnk. Rj. GAMUYANG	Wakil Ketua	Cadiak Pandai	
3	PISMAYENI	Sekretaris	Bundo Kanduang	PISMAYENI	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	SUARDI, HT. Dt. Rj. INTAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	SUARDI, HT. Dt. Rj. INTAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	
5	DIAN MARDIAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	DIAN MARDIAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI